

**ANALISIS PENGARUH DANA ALOKASI UMUM DAN DANA ALOKASI KHUSUS
TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI PROVINSI SULAWESI UTARA***ANALYSIS OF THE EFFECT OF GENERAL ALLOCATION FUNDS AND SPECIFIC ALLOCATION
FUNDS ON ECONOMIC GROWTH IN NORTH SULAWESI PROVINCE*

Oleh:

Lio Satria Putra Perkasa¹**George M. V. Kawung²****Steeva Y. L. Tumangkeng³**¹²³Jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis,
Universitas Sam Ratulangi

Email:

liosatria25@gmail.comgeorgekawung@unsrat.ac.idsteevatumangkeng@unsrat.ac.id

Abstrak: Tujuan penelitian ini adalah menganalisis pengaruh Dana Alokasi Umum, Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Sulawesi Utara. Analisis data dan pengujian hipotesis dilakukan menggunakan uji asumsi klasik dan regresi linear berganda. Sampel penelitian ini adalah *Time Series* yaitu 15 tahun. Hasil penelitian secara parsial menunjukkan bahwa Variabel Dana Alokasi Umum Berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi. sedangkan Variabel Dana Alokasi Khusus, Positif tapi tidak berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Dan pada penelitian yang dilakukan secara simultan menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi.

Kata Kunci: Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Pertumbuhan Ekonomi

Abstract: The purpose of this study is research on the General Allocation Fund, and the Special Allocation Fund Against the Economy in North Sulawesi Province. Data analysis and hypothesis testing were performed using the classic assumption test and multiple linear regression. The sample of this research is the Time Series which is 15 years. Variable General Allocation Funds have a significant effect on the economic experiment. While the Special Allocation Fund Variable, Positive but does not affect the Economy. And the research carried out simultaneously shows that the General Allocation Fund, and the Special Allocation Fund show a significant influence on economic comparisons.

Keywords: General Allocation Fund, Special Allocation Fund, Economic Growth

Latar Belakang

Pembangunan ekonomi dalam perspektif yang luas dipandang sebagai suatu proses multidimensi yang mencakup pelbagai perubahan mendasar atas struktur sosial, sikap masyarakat, institusi nasional, disamping tetap mengejar akselerasi pertumbuhan ekonomi, pengurangan ketimpangan distribusi pendapatan serta pengentasan kemiskinan (Todaro, 1997). Salah satu indikator kemajuan pembangunan adalah pertumbuhan ekonomi. Indikator ini pada dasarnya mengukur kemampuan suatu negara untuk berkembang.

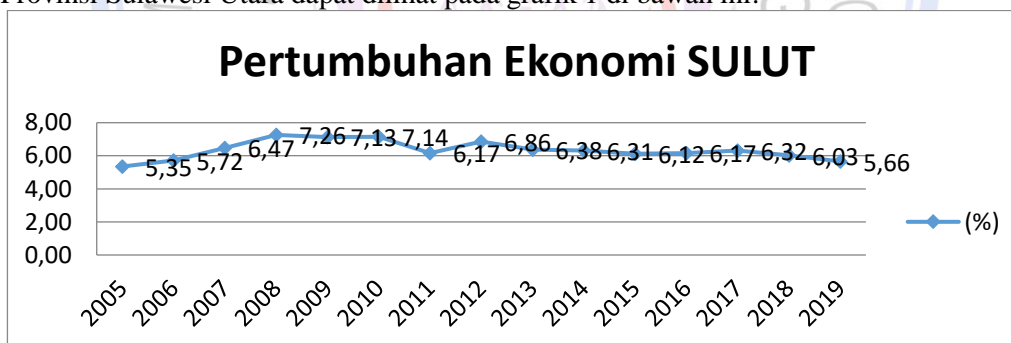
Pembangunan nasional adalah upaya untuk meningkatkan seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa dan Negara yang sekaligus merupakan proses pembangunan keseluruhan system penyelenggaraan Negara untuk mewujudkan tujuan nasional. Pembangunan nasional juga dapat diartikan sebagai rangkaian upaya pembangunan untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan nasional. Dalam mengimplementasikan pembangunan nasional senantiasa mengacu pada kepribadian bangsa dan nilai luhur yang universal untuk mewujudkan kehidupan bangsa yang berdaulat. Perkembangan daerah di Indonesia semakin pesat seiring dengan adanya era baru dalam pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. . Seperti yang diatur dalam Tap MPR No. XV/MPR/1998 yang merupakan landasan hukum atas disahkannya UU No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah dan UU No 33 Tahun 2004, tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah memberikan optimisme tinggi dan harapan baru untuk membangun daerah secara lebih maksimal karena sudah tidak terkonsentrasi di pusat, sehingga kebijakan pemerintah daerah tidak lagi bersifat, "given" dan "uniform" (selalu menerima dan seragam) dari pemerintah pusat, namun justru pemerintah daerah yang mengambil inisiatif dalam merumuskan kebijakan daerah yang sesuai dengan aspirasi, potensi, dan sosial kultural masyarakat setempat. Dalam UU No. 33 Tahun 2004 ini juga di jelaskan tentang pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dan dana perimbangan. Dana perimbangan tersebut terdiri atas, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan bagian daerah dari bagi hasil pajak pusat. Permasalahan Dana Alokasi Umum terletak pada perbedaan cara pandang antara pemerintah pusat dan daerah. Bagi pusat DAU dijadikan sebagai instrumental *horizontal imbalance*, sedangkan bagi daerah, DAU dimaksudkan untuk mendukung kecukupan pembiayaan daerah (Hamdani, et, al, 2014). Permasalahan timbul ketika daerah meminta Dana Alokasi Umum yang besar atau sesuai dengan kebutuhan pembiayaan daerahnya. Disisi lain, alokasi DAU berdasarkan kebutuhan daerah dilakukan karena dasar perhitungan *fiscal needs* tidak memadai (terbatasnya data, belum adanya standar pelayanan minimum masing-masing daerah dan system penganggaran yang belum berdasar pada standar analisis belanja), ditambah total pengeluaran anggaran khususnya APBD belum mencerminkan kebutuhan sesungguhnya dan cenderung penggunaan DAU menjadi tidak efisien.

Menurut Undang-undang Nomor, 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah, Otonomi Daerah adalah wewenang Daerah Otonomi untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang diserahkan oleh pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Perwujudan dari pelaksanaan otonomi daerah berkaitan erat dengan desentralisasi yang memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat serta pengembangan kehidupan demokrasi, (Lestari, 2012). Terdapat dua nilai dasar yang dikembangkan dalam UUD 1945 berkenaan dengan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia,yaitu; 1. Nilai Unitaris, yang diwujudkan dalam pandangan bahwa Indonesia tidak mempunyai kesatuan pemerintahan lain di dalamnya yang bersifat Negara ("*Eenheidstaat*"), yang berarti kedaulatan yang melekat pada rakyat, bangsa dan Negara Republik Indonesia tidak akan terbagi di antara kesatuan-kesatuan pemerintah; dan 2. Nilai dasar Desentralisasi Teritorial, dari isi dan jiwa pasal 18 Undang-undang dasar 1945 beserta penjelasannya sebagaimana tersebut di atas maka jelaslah bahwa Pemerintah diwajibkan untuk melaksanakan politik desentralisasi dan dekonsentrasi di bidang ketatanegaraan. Dikaitkan dengan dua nilai dasar tersebut di atas, penyelenggaran desentralisasi di Indonesia berpusat pada pembentukan daerah-daerah otonomi dan penyerahan/pelimpahan sebagian kekuasaan dan kewenangan pemerintah pusat ke pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sebagian kekuasaan dan kewenangan tersebut. Salah satu bentuk hubungan keuangan pusat dan daerah adalah Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan Dana yang bersumber dari APBN, dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kegiatan khusus yang merupakan urusan dan merupakan urusan daerah sehingga dapat membantu mengurangi beban biaya kegiatan khusus yang harus ditanggung oleh pemerintah daerah. Sedangkan Dana Alokasi Umum (DAU) juga merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (UU Nomor 33 Tahun 2004). DAU diberikan pemerintah pusat untuk membiayai kekurangan dari pemerintah daerah dalam memanfaatkan PAD. DAU bersifat "*Block Grant*"

yang berarti penggunaannya diserahkan kepada daerah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah.

Perekonomian Sulawesi Utara tahun 2019 tercatat tumbuh sebesar 5,66%, melambat dibandingkan pertumbuhan ekonomi tahun 2018 yang mencapai 6,01% (sumber:BPS). Perlambatan perekonomian global mempengaruhi kinerja Lapangan Usaha (LU) industri dan ekspor sehingga perekonomian tumbuh melambat. Sebaliknya, penguatan LU pertanian dan perdagangan menahan pertumbuhan ekonomi Sulawesi Utara melambat lebih dalam. LU industri, yang didominasi oleh industri pengolahan makanan dan minuman, tercatat tumbuh sebesar 0,31%, pada tahun 2019 melambat dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh sebesar 4,48%. Perlambatan yang terjadi pada LU tersebut imbas dari perekonomian dunia yang diproyeksikan tumbuh melambat pada tahun 2019, menyebabkan harga-harga komoditas dunia mengalami penurunan. Salah satu komoditas dunia yang mengalami penurunan harga adalah coconut oil (CNO) yang menjadi andalan Sulawesi Utara. Harga CNO dunia melanjutkan tren negatifnya selama enam bulan pertama 2019 dan secara tahunan rata-rata harganya tercatat terkontraksi sebesar 26,76% (sumber: Worldbank). Berlanjutnya kontraksi pada komoditas andalan Sulut tersebut menurunkan insentif perusahaan di industri pengolahan untuk meningkatkan produksinya. Hal ini tercermin pertumbuhan produksi industri manufaktur besar dan sedang yang secara rata-rata triwulanan terkontraksi sebesar 8,52% melambat dibandingkan rata-rata triwulanan tahun sebelumnya yang tumbuh sebesar 4,27% (sumber:BPS). Sementara itu, LU transportasi dan konstruksi menjadi LU utama Sulut lainnya yang mengalami perlambatan. LU transportasi pada tahun 2019 tercatat tumbuh sebesar 5,50% melambat dibandingkan tahun 2018 yang tumbuh sebesar 7,87%. Kenaikan tarif angkutan udara pada enam bulan pertama di tahun 2019 diperkirakan mengurangi insentif mobilisasi masyarakat menggunakan angkutan udara. Hal ini tercermin dari jumlah penumpang di Sulawesi Utara yang mengalami kontraksi sebesar 16,48% dan penurunan jumlah penerbangan sebesar 15,85%, meskipun terdapat upaya pemerintah dalam mengambil kebijakan menurunkan tarif batas atas pada bulan Juni 2019. Adapun LU konstruksi tercatat tumbuh sebesar 5,81% meskipun melambat dibandingkan tahun sebelumnya yang tercatat tumbuh 7,16% seiring belum optimalnya realisasi belanja modal pemerintah baik yang bersumber dari APBD maupun APBN.

Berdasarkan data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) provinsi Sulawesi Utara, laju Pertumbuhan Ekonomi di Sulawesi Utara selalu mengalami Fluktuasi. Berikut Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sulawesi Utara dapat dilihat pada grafik 1 di bawah ini:

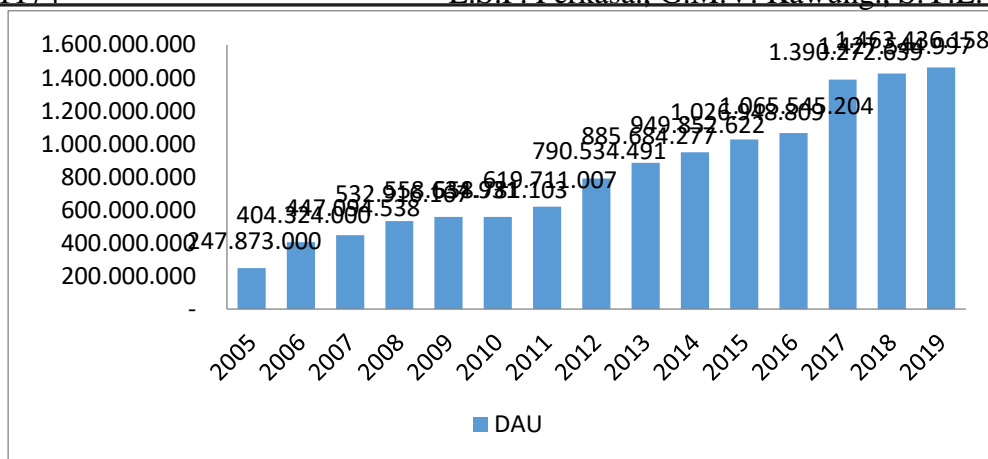


Grafik 1 Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sulawesi Utara

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) SULUT 2020

Pada Grafik 1 di Atas dapat dilihat bahwa Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sulawesi Utara mengalami Fluktuasi. Pada Tahun 2005 Pertumbuhan Ekonomi sebesar 5,35%, sampai pada tahun 2008 Pertumbuhan Ekonomi terus mengalami Peningkatan, namun pada Tahun 2009 pertumbuhan ekonomi menurun menjadi sebesar 7,13%. Dan pada Tahun 2010 - 2012 pertumbuhan ekonomi meningkat dari 7,14% menjadi 6,86%. dan menurun pada tahun 2013, 2014, 2015 laju pertumbuhan ekonomi Sulawesi Utara 2013 sebesar 6,38%, tahun 2014 sebesar 6,31%, tahun 2015 sebesar 6,12%, dan naik kembali pada tahun 2016 – 2017 dari 6,17% menjadi 6,32%, dan pada tahun 2018 – 2019 Pertumbuhan Ekonomi Sulawesi Utara menurun dari 6,03% menjadi 5,66%.

Presentase pembagian DAU antara provinsi dan kabupaten/kota adalah 10% dari total DAU Nasional dialokasikan kepada Provinsi dan 90% dari total DAU Nasional dialokasikan kepada kabupaten/kota. Perhitungan besaran DAU secara nasional adalah minimal 26% dari Pendapatan Dalam Negeri Netto (PDN Netto). PDN Netto adalah Pendapatan Dalam Negeri dikurangi dengan bagi hasil yang diberikan pusat kepada daerah. Realisasi Dana Alokasi Umum Provinsi Sulawesi Utara dapat dilihat pada Tabel 2 di bawah ini:

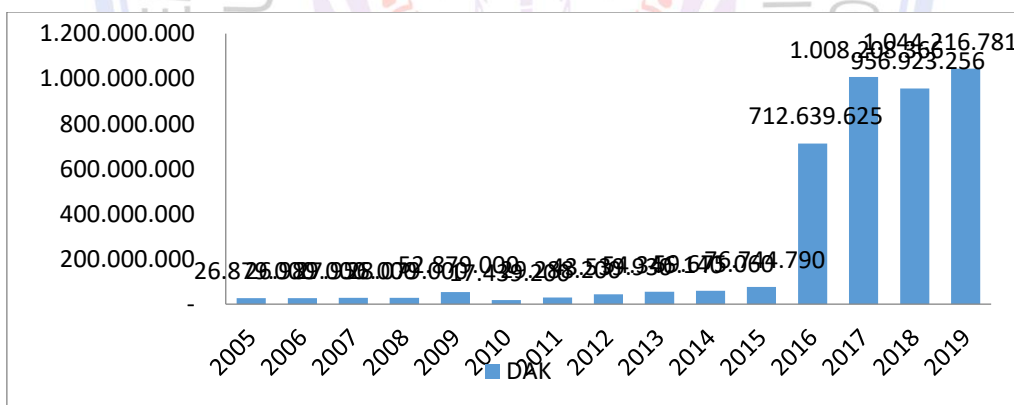


Grafik 2 Perkembangan Dana Alokasi Umum di Provinsi Sulawesi Utara

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) SULUT 2020

Dari Grafik 2 di atas menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) pada Provinsi Sulawesi Utara mengalami peningkatan yang signifikan, pada tahun 2005 sampai tahun 2019, pada tahun 2005 Dana Alokasi Umum sebesar 247.873.000, pada tahun 2015 sebesar 1.026.948.809 hingga sampai pada tahun 2019 Dana Alokasi Umum terus meningkat sebesar 1.463.436.158. Ekonomi mengalami penurunan sebesar 6,17% dan naik kembali pada Tahun 2012 sebesar 6,86%, dan sampai pada Tahun 2019 Pertumbuhan Ekonomi terus mengalami fluktuasi hingga pada Tahun 2019.

Dana alokasi khusus (DAK) adalah dana yang berasal dari apbn kepada provinsi/kota/kabupaten tertentu yang bertujuan untuk menadani kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintah daerah dan sesuai prioritas nasional. Dana alokasi khusus dialokasikan pada kegiatan investasi pembangunan, pengadaan, peningkatan, dan perbaikan sarana dan prasarana dengan umur ekonomis yang panjang Perkembangan Dana Alokasi Khusus dapat dilihat pada Grafik 3 di bawah.



Grafik 3 Perkembangan Dana Alokasi Khusus Daerah di Provinsi Sulawesi Utara

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) SULUT 2020

Berdasarkan Grafik 4.2 di atas menunjukkan bahwa dana alokasi khusus (DAK) kabupaten minahasa mengalami Fluktuasi, pada tahun 2005 – 2009 dari 26.879.000 terus meningkat hingga menjadi 52.879.000, dan pada tahun 2010 Dana Alokasi Khusus Sulawesi Utara turun sebesar 17.439.200 pada tahun 2011 – 2017 Dana Alokasi Khusus Sulawesi Utara mengalami kenaikan terus menerus sampai pada tahun 2017, pada tahun 2018 Dana Alokasi Khusus Sulawesi Utara kembali menurun sebesar 956.923.256, dan kembali naik pada tahun 2019 sebesar 1.044.216.781.

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan Apakah Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus berpengaruh secara parsial dan simultan Terhadap Perumbuhan Ekonomi di Sulawesi Utara?

TINJAUAN PUSTAKA**Landasan Teori****Teori Pertumbuhan Ekonomi**

Pertumbuhan Ekonomi dapat di artikan peningkatan output agregat atau pendapatan riil. Kedua peningkatan tersebut biasanya di hitung perkapita atau selama jangka waktu yang cukup panjang sebagai akibat peningkatan penggunaan input. Pertumbuhan Ekonomi merupakan suatu proses perubahan kondisi perekonomian suatu negara yang berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Dari aspek dinamis melihat bagaimana suatu perekonomian berkembang atau berubah dari waktu ke waktu. Todaro dan Smith, (2006).

Teori Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Umum adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi. Pembagian dana untuk daerah melalui bagi hasil berdasarkan daerah penghasil cenderung menimbulkan ketimpangan antar daerah dengan mempertimbangkan kebutuhan dan potensi daerah. Dana Alokasi Umum bagi daerah yang potensi fiskalnya besar namun kebutuhan fiskalnya kecil akan memperoleh alokasi Dana Alokasi Umum yang relatif kecil. Sebaliknya daerah yang memiliki potensi fiskalnya kecil namun kebutuhan fiskalnya besar akan memperoleh alokasi Dana alokasi Umum relatif besar. Dengan maksud melihat kemampuan APBD dalam membiayai kebutuhan-kebutuhan daerah dalam rangka pembangunan daerah yang dicerminkan dari penerimaan umum APBD dikurangi dengan belanja pegawai (Halim, 2009).

Teori Dana Alokasi Khusus

Pengertian DAK diatur dalam Pasal 1 angka 23 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Keuangan Pusat dan Keuangan Daerah, yang menyebutkan bahwa: "Dana Alokasi Khusus, selanjutnya disebut DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional." Pelaksanaan DAK sendiri diarahkan pada kegiatan investasi pembangunan, pengadaan, peningkatan, dan/atau perbaikan sarana dan prasarana fisik pelayanan masyarakat dengan umur ekonomis yang panjang, termasuk pengadaan sarana fisik penunjang, dan tidak termasuk penyertaan modal.

Hubungan Dana Alokasi Umum Dengan Pertumbuhan Ekonomi

Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi diharapkan beriringan dengan meningkatnya kepuasan publik terhadap pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah daerah melalui penggunaan Dana Alokasi Umum. DAU merupakan dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan untuk memperkuat kondisi fiskal daerah dan mengurangi ketimpangan antar daerah (horizontal imbalance) guna membiayai kebutuhan pengeluarannya. Kenyataannya bahwa setiap daerah mempunyai potensi fiskal yang beragam, perbedaan ini selanjutnya dapat menghasilkan Pertumbuhan Ekonomi yang beragam pula. Dana transfer dari pemerintah pusat diharapkan digunakan secara efektif dan efisien oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan pelayanannya kepada masyarakat. Pembangunan dalam sektor pelayanan kepada publik akan merangsang masyarakat untuk lebih aktif dan bergairah dalam bekerja karena sudah ditunjang oleh fasilitas yang memadai. Selain itu investor juga akan tertarik kepada daerah karena fasilitas yang diberikan oleh pemerintah daerah sehingga hal tersebut akan memicu peningkatan Pertumbuhan Ekonomi di daerah. (Sidik, 2003:25)

Hubungan Dana Alokasi Khusus Dengan Pertumbuhan Ekonomi

Untuk meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi pemerintah daerah diharapkan dapat meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana fisik daerah melalui penggunaan Dana Alokasi Khusus. DAK adalah salah satu mekanisme transfer keuangan pemerintah pusat ke daerah yang bertujuan antara lain untuk meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana fisik daerah sesuai prioritas nasional serta mengurangi kesenjangan laju

Pertumbuhan Ekonomi antar daerah dan pelayanan antar bidang. DAK memainkan peran penting dalam dinamika pembangunan, pengadaan, peningkatan, perawatan serta perbaikan sarana dan prasarana pelayanan dasar di daerah dengan umur ekonomis panjang, karena hal tersebut sesuai dengan prinsip desentralisasi tanggung jawab dan akuntabilitas bagi penyediaan pelayanan dasar masyarakat telah dialihkan kepada pemerintah daerah. Pengalokasian DAK kepada daerah sepenuhnya menjadi wewenang pemerintah pusat berdasarkan kriteria tertentu, dengan diarahkannya pemanfaatan DAK untuk kegiatan pembangunan yang akan mendorong aktifitas perekonomian dan percepatan pembangunan yang kemudian meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi di daerah (Sutedi Adrian, 2012:143).

METODE PENELITIAN

Jenis Data dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder *time series*, yang bersumber dari Badan Pusat Statistika (BPS) Sulawesi Utara.

Metode Analisis Data

Uji Asumsi Klasik

Asumsi klasik yang digunakan adalah asumsi klasik heteroskedastisitas, multikolinearitas, dan auto korelasi. dalam literatur ekonometrika dikemukakan berapa asumsi klasik yang harus dipenuhi oleh suatu model regresi agar model regresi tersebut dapat dipakai. asumsi klasik tersebut adalah bebas heteroskedastisitas, tidak ada multikolinearitas, dan bebas auto korelasi.

Asumsi Klasik Normalitas

Uji Normalitas data yaitu melakukan pengujian terhadap data yang dimiliki untuk menguji normal tidaknya sebaran data yang akan dianalisis, dengan uji normalitas residual yaitu dengan menggunakan grafik dan Kolmogorov Smirnov. Jika tingkat signifikansi > 0.05 , maka data adalah normal.

Asumsi Klasik Heteroskedastisitas

Tujuan Uji Heteroskedastisitas adalah menguji sebuah model regresi apakah terjadi ketidaksamaan varians dan residual dan satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varians dan residual dan satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut homoskedastisitas. Dan jika varians berbeda, disebut heteroskedastisitas. Uji heteroskedastisitas dalam penelitian ini diuji dengan menggunakan uji scatter plot. Apabila data menyebar dan tidak membentuk suatu pola tertentu maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

Asumsi Klasik Multikolinearitas

Multikolinearitas diartikan sebagai adanya hubungan linear baik yang pasti maupun yang mendekati pasti diantara variabel X, konsekuensi dan multikolinearitas yaitu bila ada kolinearitas sempurna diantara X, koefisien regresinya tak tentu ada kesalahan standarnya tak terhingga. Jika kolinearitas tingkatnya tinggi tetapi tidak sempurna, penaksiran koefisien regresinya tinggi tetapi tidak sempurna, penaksiran koefisien Regresinya adalah mungkin, tetapi kesalahan standarnya cenderung untuk besar. Sedang hasilnya nilai populasi dan koefisien tidak dapat ditaksir dengan tepat. Multikolinearitas terjadi bila nilai VIF (Variance Inflation Factor) > 10 .

Asumsi Klasik Autokorelasi

Satu asumsi penting dalam model regresi linier klasik ialah bahwa tidak ada autokorelasi, yaitu korelasi antara anggota serangkaian observasi runtut waktu (data time series) dan data silang waktu (data crossection). Untuk mendeteksi hal tersebut maka digunakan Uji statistic Durbin Waston.

Ho : Tidak ada autokorelasi baik positif maupun negative

Ha : Ada autokorelasi baik positif maupun negative

Jika dilakukan dengan pengujian tes hipotesis Durbin Waston adalah:

$d < d_l$ = menolak Ho

$d > 4 - d_l$ = menolak Ho

$d_u < d < 4 - d_u$ = menerima Ho

$d_l \leq d \leq d_u$ = pengujian tidak meyakinkan

$4 - d_u \leq d \leq 4 - d_l$ = pengujian ragu-ragu

Analisis Regresi Berganda

Analisis ini digunakan untuk mengetahui besarnya variabel independen terhadap variabel dependen, dengan asumsi variabel yang lain konstan dimana rumusnya :

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2$$

Keterangan:

- Y = Pertumbuhan Ekonomi
 X1 = Dana Alokasi Umum
 X2 = Dana Alokasi Khusus
 a = Konstanta regresi
 b₁, b₂, b₃ = Koefisien regresi

Uji Statistik-T

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas/independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen.

Kriteria pengujian:

- Ho: $b_{1,2,3} = 0$, Artinya, variabel Dana Alokasi Umum Dan Dana Alokasi Khusus tidak berpengaruh yang signifikan terhadap variabel Pertumbuhan Ekonomi.
 Ha: $b_{1,2,3} \neq 0$, Artinya, variabel Dana Alokasi Umum Dan Dana Alokasi Khusus berpengaruh yang signifikan terhadap variabel Pertumbuhan Ekonomi.

Cara melakukan uji t adalah sebagai berikut :

- $t_{hitung} \geq t_{tabel}$, maka Ho ditolak dan Ha diterima
- $t_{hitung} \leq t_{tabel}$, maka Ho diterima dan Ha ditolak

Uji Statistik F

Uji Statistik F digunakan untuk menguji tingkat signifikansi koefisien regresi variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen, Kriteria pengujian:

- Ho: $b_{1,2,3} = 0$, Artinya, variabel Dana Alokasi Umum Dan Dana Alokasi Khusus secara bersama-sama tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel Pertumbuhan Ekonomi.
 Ha: $b_{1,2,3} \neq 0$, Artinya, variabel Dana Alokasi Umum Dan Dana Alokasi Khusus secara bersama-sama mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel Pertumbuhan Ekonomi.

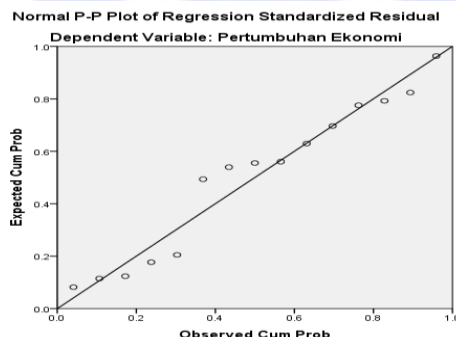
Cara melakukan uji t adalah sebagai berikut:

- $F_{hitung} \leq F_{tabel}$, maka Ha ditolak dan Ho diterima
- $F_{hitung} \geq F_{tabel}$, maka Ha diterima dan Ho ditolak

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Uji Normalitas Data

Uji Normalitas Data dapat dilihat dengan menggunakan metode P-P Plot. Hasilnya adalah sebagai berikut:



Gambar 1 Hasil Pengujian Normalitas dengan P-P Plot

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) SULUT 2020

Dari uji P-P Plot di atas terlihat bahwa sebaran data membentuk atau mengikuti garis linear, sehingga dapat dikatakan bahwa data berdistribusi normal.

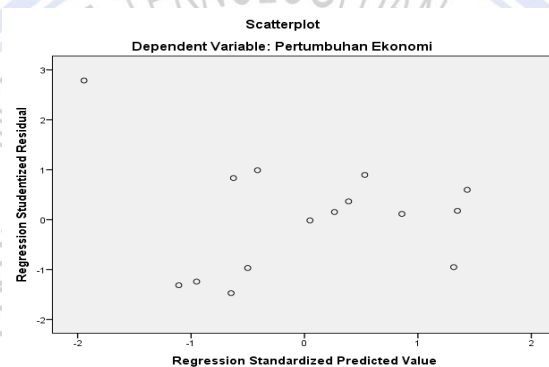
Uji Asumsi Klasik**Uji Multikolinearitas****Tabel 1 Uji Multikolinearitas**

| Model | Coefficients ^a | | | | | Collinearity Statistics | |
|---------------------|-----------------------------|------------|---------------------------|--------|------|-------------------------|-------|
| | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients | | Sig. | Tolerance | VIF |
| | B | Std. Error | Beta | t | | | |
| (Constant) | 803.109 | 50.082 | | 16.036 | .000 | | |
| Dana Alokasi Umum | .454 | .055 | .836 | 8.242 | .000 | .332 | 3.008 |
| Dana Alokasi Khusus | .031 | .019 | .169 | 1.669 | .121 | .332 | 3.008 |

a. Dependent Variable: Pertumbuhan Ekonomi

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) SULUT 2020

Berdasarkan output di atas diketahui bahwa: nilai Tolerance Variabel Dana Alokasi (X1), dan Dana Alokasi Khusus (X2), yakni lebih besar dari 0,10. Sementara itu nilai VIF variabel Dana Alokasi (X1), dan Dana Alokasi Khusus (X2) yakni lebih kecil dari 10,00 sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi Multikolinearitas.

Uji Heteroskedastisitas**Gambar 2 Uji Heteroskedastisitas**

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) SULUT 2020

Untuk Uji Heteroskedastisitas dapat dilihat dari scatterplot di atas, jika data menyebar pada garis nol dan tanpa membentuk pola tertentu maka data dapat dikatakan bebas Heteroskedastisitas, atau data homogen.

Uji Autokorelasi**Tabel 2. Uji Autokorelasi**

| Model Summary ^b | | | | | |
|----------------------------|-------------------|----------|-------------------|----------------------------|---------------|
| Model | R | R Square | Adjusted R Square | Std. Error of the Estimate | Durbin-Watson |
| 1 | .979 ^a | .959 | .952 | 2.67202 | 1.311 |

a. Predictors: (Constant), Dana Alokasi Khusus, Dana Alokasi Umum

b. Dependent Variable: Pertumbuhan Ekonomi

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) SULUT 2020

Dari hasil output di atas didapat nilai DW yang dihasilkan dari model regresi adalah 1.311. dari tabel DW dengan signifikansi 0,05 dan jumlah data (n) = 15, serta variabel independen (k) = 2 diperoleh nilai DL sebesar 0,945 dan DU sebesar 1,543, karena nilai DW (1.311) lebih besar dari DU maka tidak terdapat autokorelasi.

Analisis Regresi Berganda**Tabel 3 Korelasi dan Koefisien Determinasi**

| Model Summary^b | | | | |
|----------------------------------|-------------------|----------|-------------------|----------------------------|
| Model | R | R Square | Adjusted R Square | Std. Error of the Estimate |
| 1 | .979 ^a | .959 | .952 | 2.67202 |

a. Predictors: (Constant), Dana Alokasi Khusus, Dana Alokasi Umum
b. Dependent Variable: Pertumbuhan Ekonomi

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) SULUT 2020

Berdasarkan perhitungan dengan menggunakan SPSS v.22 diperoleh koefisien korelasi dan determinasi, yaitu:

- Nilai Koefisien Korelasi (R) adalah sebesar 0.979. besaran nilai koefisien korelasi ini mengandung arti bahwa keeratan hubungan antara Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus sebagai variabel bebas dengan variabel Pertumbuhan Ekonomi sebagai variabel terikat adalah sangat erat dan bersifat positif.
- Nilai Koefisien Determinasi (R^2) 0,959 = 95,9%. Dengan demikian bahwa pengaruh pendapatan pemerintah pada bidang Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus secara bersama-sama terhadap Pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi Utara adalah sebesar 95,9%. Sedangkan sisanya 4,1% ditentukan oleh variabel-variabel lain.

Uji Statistik-T**Tabel 4 Uji t (Uji Parsial)**

| Coefficients^a | | | | | | |
|---------------------------------|---------------------|-----------------------------|------------|---------------------------|--------|------|
| Model | | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients | | |
| | | B | Std. Error | Beta | t | Sig. |
| 1 | (Constant) | 803.109 | 50.082 | | 16.036 | .000 |
| | Dana Alokasi Umum | .454 | .055 | .836 | 8.242 | .000 |
| | Dana Alokasi Khusus | .031 | .019 | .169 | 1.669 | .121 |

a. Dependent Variable: Pertumbuhan Ekonomi

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) SULUT 2020

Berdasarkan data output SPSS dalam tabel ini maka dapat diberi interpretasi sebagai berikut:

- Persamaan regresi dari penelitian ini adalah : $Y=803.109+0.454X_1+0.031X_2$
- Nilai konstanta sebesar 803.109 mengandung arti bahwa jika Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus bertambah sebesar 1%, Pertumbuhan Ekonomi akan meningkat sebesar 803.109.
- Nilai Koefisien X_1 sebesar 0.454 mengandung arti bahwa jika Dana Alokasi Umum bertambah sebesar 1% maka Pertumbuhan Ekonomi meningkat sebesar 0.454. Nilai Koefisien X_2 sebesar 0.031 mengandung arti bahwa jika Dana Alokasi Khusus bertambah sebesar 1%, maka Pertumbuhan Ekonomi Meningkat sebesar 0,031.
- Nilai t_{hitung} Dana Alokasi Umum adalah 8.242, dan Nilai t_{hitung} Dana Alokasi Khusus adalah 1.669, Nilai t_{tabel} adalah 2.178 yang diperoleh dengan Alpha 0.05 dan df sebesar yakni (15-2-1), pada sisi lain nilai signifikansinya (sig) Dana Alokasi Umum 0,000, dan Dana Alokasi Khusus 0.121,
- Variabel Dana Alokasi Umum nilai t_{hitung} lebih Besar dari nilai t_{tabel} , dan nilai signifikansinya lebih kecil dari Alpha, maka H_0 ditolak dan H_a diterima berarti bahwa variabel Dana Alokasi Umum memiliki pengaruh secara parsial terhadap Pertumbuhan Ekonomi.
- Variabel Dana Alokasi Khusus nilai t_{hitung} lebih Kecil dari nilai t_{tabel} dan nilai signifikansinya lebih besar dari Alpha, Maka H_0 di terima dan H_a ditolak berarti bahwa variabel Dana Alokasi Khusus tidak memiliki pengaruh secara parsial terhadap Pertumbuhan Ekonomi.

Uji Statistik-F**Tabel 5 Uji F (Uji Simultan)**

| | | ANOVA ^a | | | | |
|-------|------------|--------------------|----|-------------|---------|-------------------|
| Model | | Sum of Squares | df | Mean Square | F | Sig. |
| 1 | Regression | 2002.057 | 2 | 1001.029 | 140.206 | .000 ^b |
| | Residual | 85.676 | 12 | 7.140 | | |
| | Total | 2087.733 | 14 | | | |

a. Dependent Variable: Pertumbuhan Ekonomi

b. Predictors: (Constant), Dana Alokasi Khusus, Dana Alokasi Umum

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) SULUT 2020

Berdasarkan output diatas tampak bahwa nilai F_{hitung} pada model penelitian ini adalah sebesar 140.206 dengan taraf signifikansi sebesar 0.000. Nilai F_{tabel} adalah 3.810 yang diperoleh dengan Alpha 0.05 dan df (15=jumlah sampel – 2=variabel bebas). Nilai F_{hitung} 140.206 lebih besar dari nilai F_{tabel} 3.810 Maka H_a diterima dan H_o ditolak, dengan demikian Variabel Independen Berpengaruh secara bersama-sama (simultan) terhadap Variabel Dependen.

Pembahasan Analisis**Pengaruh Dana Alokasi Umum Terhadap Pertumbuhan Ekonomi**

Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan dengan uji t-test, hipotesis pertama menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif Dana Alokasi Umum terhadap Pertumbuhan Ekonomi” dalam pengujian statistik secara parsial menunjukkan Nilai signifikansi sebesar 0,000, nilai ini jauh lebih rendah dibandingkan dengan 0,05. Nilai t_{hitung} 8,242 > t_{tabel} 2,178 maka Dana Alokasi Umum terhadap Pertumbuhan Ekonomi adalah positif signifikan. Hasil ini menunjukkan bahwa semakin tinggi Dana Alokasi Umum maka Pertumbuhan Ekonomi akan semakin meningkat, begitu pula sebaliknya jika semakin rendah Dana Alokasi Umum maka Pertumbuhan Ekonomi akan semakin rendah.

Penelitian sejalan dengan yang dilakukan oleh Pungky Siswiyanti (2015), dan Argo Fahma A. P, Ida Nuraini (2017) Yang menyatakan bahwa secara parsial/individu Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Hasil penelitian ini bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Lily Kusumawati (2018), dan Meylani M. Arina(2019), Yang menyatakan bahwa secara parsial/individu Dana Alokasi Umum (DAU) Tidak berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi.

Pengaruh Dana Alokasi Khusus Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Hipotesis kedua yang menyatakan bahwa “terdapat pengaruh positif tapi tidak signifikan Dana Alokasi Khusus terhadap Pertumbuhan Ekonomi” dalam pengujian statistik secara parsial menunjukkan Nilai signifikansi sebesar 0,121, nilai ini jauh lebih tinggi dibandingkan dengan 0,05. Nilai t_{hitung} 1,669 < t_{tabel} 2,178 maka Dana Alokasi Khusus terhadap Pertumbuhan Ekonomi adalah positif tetapi tidak signifikan dalam memberikan kontribusi terhadap Pertumbuhan Ekonomi, yang disebabkan oleh t_{hitung} jauh lebih kecil dibandingkan dengan t_{tabel} dan penyebab lainnya adalah karena rentang yang sangat jauh antara nilai minimum yaitu sebesar Rp. 17.439.200.000 dan nilai maksimum sebesar Rp. 1.044.216.781.000 dan nilai rata-rata sebesar Rp. 277.720.223.

Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Pungky Siswiyanti (2015), Meylani M. Arina (2019), Juwari (2016) Yang menyatakan bahwa secara parsial/individu Dana Alokasi Khusus (DAK) tidak berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Hasil Penelitian ini bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Lily Kusumawati (2018), Yang menyatakan bahwa secara parsial/individu Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi.

Pengaruh Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Secara bersama-sama/simultan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Pada uji statistik F yang menguji pengaruh seluruh variabel independen yaitu Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap variabel dependen yaitu variabel Pertumbuhan Ekonomi membuktikan bahwa secara simultan kedua variabel independen secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel dependen dengan Hasil pengujian statistik uji F dengan nilai signifikansi 0,000, nilai ini jauh lebih kecil dari 0,05, F_{tabel} yaitu 3,810 dan F_{hitung} sebesar 140.206 sehingga F_{hitung} > F_{tabel} yang berarti secara simultan seluruh variabel independen Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus

(DAK) berpengaruh positif signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Dengan demikian, hipotesis yang menyatakan “terdapat pengaruh positif Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) secara simultan/bersama terhadap Pertumbuhan Ekonomi” dapat diterima.

Hasil penelitian ini didukung/sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Juwari (2016), Meylani M. Arina (2019), Argo Fahma A. P, Ida Nuraini (2017), dengan hasil penelitian bahwa secara simultan/bersama-sama variabel independen (X) berpengaruh positif terhadap variabel dependent (Y).

PENUTUP

Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dana Alokasi Umum berpengaruh Positif dan Signifikan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sulawesi Utara.
2. Dana Alokasi Khusus tidak berpengaruh dan tidak Signifikan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sulawesi Utara.
3. Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus secara Simultan Berpengaruh Positif dan Signifikan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Di Provinsi Sulawesi Utara.

Saran

Berdasar hasil pembahasan dan kesimpulan serta keterbatasan penelitian di atas maka peneliti mencoba memberikan saran sebagai berikut:

1. Pemerintah daerah diharapkan mampu mengelola dengan baik Dana Alokasi Umum (DAU) agar Pertumbuhan Ekonomi setiap periodenya bisa bertambah.
2. Pemerintah daerah diharapkan mampu mengelola dengan baik Dana Alokasi Khusus (DAK) agar Pertumbuhan Ekonomi setiap periodenya bisa digunakan secara optimal dan tepat sasaran.
3. Bagi peneliti selanjutnya agar mengambil populasi selain kabupaten dan kota yang ada di Provinsi Sulawesi Utara dan menambah variabel penelitian yang lebih lengkap dan bervariasi. Penambahan variabel independen lain, baik ukuran-ukuran atau jenis penerimaan pemerintah daerah lainnya, maupun variabel non-keuangan seperti kebijakan pemerintah, kondisi makro-ekonomi.

DAFTAR PUSTAKA

- Argo Fahma A. P, Ida Nuraini (2017), dengan judul *Pengaruh Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2011-2016* <http://ejournal.umm.ac.id/index.php/jie/article/view/6076> Vol 1, No 2 (2017) Diakses tanggal 08 Februari 2020.
- Halim, (2009), *Akuntansi sector Publik. Akuntansi Keuangan Daerah, Edisi Pertama* Jakarta: Salamba Empat.
https://id.wikipedia.org/wiki/Dana_Alokasi_Umum
<https://sulut.bps.go.id/sulut-dalam-angka>
- Juwari, Djoko Setyadi, Dan Yana Ulfah (2016) Dengan Judul *Pengaruh Pajak Dan Retribusi Serta Dana Aloksi Umum Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Daerah Dan Pertumbuhan Ekonomi Pada Kabupaten/Kota Di Wilayah Kalimantan* Volume 07 Nomor 01 Maret 2016 <http://jurnal.uniba-bpn.ac.id/index.php/geoekonomi> Diakses tanggal 08 Februari 2020.
- Lestari, Sri. (2012). *Psikologi Keluarga: Penanaman Nilai dan Penanganan Konflik Dalam Keluarga*. Jakarta: Kencana.
- Lily Kusumawati dan I Gusti Bagus Wiksuana (2018) Dengan Judul *Pengaruh Pendapatan Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Wilayah Sarbagita Provinsi Bali*. Vol 7 No 5 (2018) <https://ojs.unud.ac.id/index.php/Manajemen/article/view/37740> Diakses tanggal 08 Februari 2020.

Meylani M. Arina, Rosalina A.M. Koleangan, Deisy S.M. Engka (2019). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kota Manado*. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jpekd/article/view/23451> Vol 20, No 01 (2019) Diakses tanggal 08 Februari 2020.

Pungky Siswiyanti (2015, Dengan Judul *Pengaruh Pad, Dau, Dak Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dengan Belanja Modal Sebagai Variabel Intervening*. Vol 7, No 1: AKRUAL: Jurnal Akuntansi (Oktober 2015) <https://journal.unesa.ac.id/index.php/aj/article/view/1329/921> Diakses tanggal 08 Februari 2020.

Sidik, 2003:25. *Dana Alokasi Umum-Konsep, Hambatan, dan Prospek di Era Otonomi Daerah*, Kompas. Jakarta.

Sutedi, Andrian. 2012. "Good Corporate Governance". Edisi 1. Cetakan Kedua. Jakarta: Sinar Grafika.

Todaro, M. (2006). *Pembangunan Ekonomi Di Dunia Ketiga*. Jakarta: Erlangga

Todaro, Michael. P. 1997. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga. Jilid 1 & 2*. Jakarta : Erlangga

Undang-undang No.32 Tahun 2004 tentang *Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah*

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang *Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah*

